

ABSTRAK

Firman Hakim : Penelitian ini berjudul “*Implementasi Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Tinjauan Siyasah Dusturiyah*”

Perda Kota Tasikmalaya No. 10 Tahun 2017 tentang Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, keberlangsungan hidup dan mencegah permasalahan kesejahteraan sosial. Akan tetapi kebijakan perda tersebut dirasa masih kurang optimal sehingga berimbas masih terdapat banyaknya persoalan mengenai penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Tujuan dari penelitian ini adalah *pertama* untuk mengetahui indikator kesejahteraan sosial Menurut Perda Kota Tasikmalaya No. 10 Tahun 2017, *kedua* untuk mengetahui Bentuk Kebijakan Pemda Kota Tasikmalaya Dalam Upaya Pelaksanaan Perda Kota Tasikmalaya No.10 Tahun 2017, *ketiga* untuk mengetahui Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Kebijakan Pemda Kota Tasikmalaya Dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Metode penggunaan yang dipakai dalam penelitian ini ialah deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris serta jenis data yang digunakan kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data primer diperoleh dari Dinas Sosial, Satpol PP, Bagian Hukum Balai Kota dan DPRD Kota Tasikmalaya. Kemudian untuk data sekunder berupa dokumen yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan tulisan ilmiah lainya yang berkaitan dengan objek penelitian.

Hasil dari penelitian ini menjabarkan bahwa *petama* dengan menggunakan teori negara kesejahteraan (*welfare state*) indikator kesejahteraan sosial PMKS masih belum optimal secara menyeluruh teratasi dalam mencapai kesejahteraan sosial yang diinginkan, *kedua* Bentuk kebijakan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya sudah termuat di dalam Perda No. 10 Tahun 2017 diantaranya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial PMKS, pemberdayaan fakir miskin serta PMKS, adanya jaminan sosial, program kantartibmas, operasi penertiban fasilitas umum, menggandeng tokoh agama dan aturan pelaksana yakni Perwalkot No. 47 Tahun 2018 tentang Pendataan dan Pengelolaan Data PMKS. Berdasarkan teori George C. Edward III Dinas Sosial Kota Tasikmalaya dalam pelaksanaannya terdapat kekurangan yakni, aspek *komunikasi* kurang sosialisasi kebijakan perda, *sumber daya* kekurangan pegawai, minim anggaran, serta sarana prasarana, *disposisi* sudah sesuai tugas pokok dan fungsi melaksanakan dengan sepenuh hati dan *struktur birokrasi* belum memiliki UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas). Dan *Ketiga* Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap kebijakan Pemda Kota Tasik dalam penanganan PMKS harus menciptakan kemaslahatan, adanya kebermanfaatn dan tidak boleh memberikan kemudaratn.

Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Daerah, PMKS, Kebijakan